DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL : PEWARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Oleh

Laksana Arum Nugraheni, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

e-mail: laksanaarumn@gmail.com

Abstrak

Dinamika hukum waris adat tidak lepas dari peranan pemuka adat dan hakim yang melakukan penemuan hukum dalam memutus perkara di pengadilan. Sistem pewarisan adat mengalami pergeseran karena lahirnya produk-produk hukum yang mengarahkan sistem pewarisan dengan memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Perkembangan hukum waris adat ditunjukkan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1961 Reg No. 179/K/Sip/1961. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal terkait pewarisan kepada anak perempuan; 2) Bagaimana arah perkembangan hukum waris adat terhadap pewarisan kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dinamika hukum waris adat yang perkembangannya harus mengakomodasi rasa keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder yang dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat patrilineal mengalami pergeseran sistem pewarisan ke arah individual. Arah perkembangan hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal menempatkan persamaan kedudukan dan hak antara anak perempuan dan anak laki-laki sebagai ahli waris.

Kata kunci : *Hukum Waris Adat, Sistem Kekerabatan Patrilineal, Perempuan*

PENDAHULUAN

Hukum waris masih bersifat pluralistik sehingga berlaku beragam hukum waris di Indonesia. Sistem hukum waris adat sebagai salah satu sistem hukum waris, di samping hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat juga bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral.

Soerojo Wignjodipoero berpendapat bahwa hukum waris adat meliputi norma-

norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.¹ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung), hlm. 161.

sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.²

Ellyne Dwi Poespasari menyatakan bahwa pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan menjadi proses penerusan harta peninggalan pada saat pewaris masih hidup disebut “penghibahan” dan proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu pemilikinya meninggal dunia disebut “warisan”. Berdasarkan pembedaan tersebut maka hukum waris adat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.³

Pada sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan karena kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya. Anak perempuan dipersiapkan untuk memperkuat keturunan orang lain yakni garis keturunan suaminya kelak. Apabila keluarga patrilineal tidak mempunyai anak lelaki atau tidak mempunyai keturunan sama sekali maka dikatakan “putus keturunan”,⁴ (Batak : *punu*, Lampung : *mupus*, Bali : *putung*) sehingga dalam bidang hukum waris adat dimungkinkan terjadi pengangkatan anak demi meneruskan garis keturunan bapaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Putusan-putusan tersebut bertentangan dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat dengan sistem patrilineal. Yurisprudensi merupakan terobosan yang baru sehingga

terjadi pergeseran dalam nilai hukum adat yang lama ke arah nilai hukum adat yang baru, khususnya bahwa yurisprudensi menggeser kedudukan laki-laki ke arah persamaan hak dan derajat dengan kedudukan perempuan.⁵

Perselisihan atau sengketa waris sering terjadi di masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan terhadap rasa keadilan yang tidak dipenuhi ketika suatu masyarakat justru secara kaku melaksanakan hukum adat tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan pembaharuan paradigma berpikir masyarakat maka hukum adat tidak dapat lagi berlaku secara kaku. Masyarakat kini terbuka pada pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan hak bagi anak perempuan untuk mewarisi harta kekayaan ayah mereka. Ini bertentangan dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat, khususnya dalam komunitas patrilineal. Perspektif hak asasi manusia digunakan untuk mengkritisi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris dalam hukum adat. Sejalan dengan bunyi Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan “perkembangan zaman dan peradaban”.

Putusan yang mengatasnamakan adat sering terjadi pro dan kontra sehingga implementasi di lapangan tidak sesuai dengan isi putusan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pengaturan sistem pewarisan bagi anak perempuan di Bali. Pada umumnya yang berhak mewarisi di Bali adalah anak laki-laki yang merupakan penerus keturunan ayahnya, dikenal dengan istilah *lempeng* atau *purusa* yang artinya pewarisan hanya ditujukan kepada laki-laki dalam sistem kekerabatan patrilineal. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam awig-awig setiap Desa Pakraman, hal ini tidak lepas dari pengaruh

² Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 36.

³ Ellyne Dwi P., 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group), hlm. 16.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan*, (Jakarta : Fajar Agung), hlm.202.

⁵ Ellyne Dwi P., *Op.Cit.*, hlm.196.

agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali. Hasil Pesamuhan Agung III yang digelar pada tanggal 15 Oktober Tahun 2010, yang dituangkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3MDP Bali/X/2010 menyebutkan adanya hak waris bagi kaum perempuan (*predana*). Keputusan ini menjadi angin segar bagi kaum perempuan di Bali. Sejalan dengan itu, terdapat yurisprudensi memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk dapat menjadi ahli waris dalam sistem kekerabatan patrilineal.⁶

Peran hukum bagi masyarakat adat sebagai “*a tool of social engineering*” sejalan dengan sifatnya yang fleksibel bertujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju keteraturan dan ketertiban serta berorientasi mewujudkan aspek keadilan. Kristalisasi hukum adat dapat berupa keputusan adat dari hasil Pesamuhan Majelis Adat yang secara substantif memuat ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau dijadikan pedoman berperilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat.⁷ Hukum adat memberikan peluang besar sebagai perwujudan aspek keadilan bagi masyarakat dalam kerangka menerapkan prinsip persamaan atau kesetaraan di muka hukum, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Hukum adat di Bali yang diwujudkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman dinilai memberikan kontribusi yang besar dalam mencairkan kekakuan dalam hukum waris adat Bali.

Sengketa waris yang disebabkan karena tidak dipenuhinya rasa keadilan merefleksikan bahwa ada salah satu pihak atau golongan yang termarginalkan. Pandangan bahwa perempuan adalah golongan atau kaum kelas dua setelah laki-laki kini kian mengalami pergeseran.

Banyak perkembangan pemikiran tentang kesetaraan gender hingga akhirnya diakomodasi dalam berbagai regulasi baik undang-undang, putusan pengadilan maupun peraturan lainnya, termasuk juga peraturan-peraturan dalam hukum adat.

Menurut doktrin relativitas yurisprudensi yang berprinsip dinamis menyatakan bahwa hukum dan perundangan secara inheren mengandung jiwa dinamis, bukan statis sehingga secara analogis yurisprudensi diciptakan oleh hakim sebagai hukum berdasarkan kasus perkara yang diperiksanya sehingga mengandung sifat statis. Hakim menciptakan hukum (*judge made law*) bukan bersifat abadi melainkan dinamis mengikuti perubahan dalam masyarakat sesuai rasa keadilan masyarakat (*sence of justice*).

Dasar hakim dalam memutus perkara adalah undang-undang, di samping itu jika hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya sendiri (*rechtsvinding*). Dalam sengketa waris adat, hakim melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan dari perspektif keadilan masyarakat dan kesetaraan gender. Tidak hanya hakim yang memegang peran atas dinamika hukum waris adat, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali turut mengambil peran dalam mencari nilai keadilan masyarakat dengan mempertimbangkan kedudukan anak perempuan Hindu untuk dapat menjadi ahli waris. Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali ini membuktikan bahwa dinamika hukum terjadi dalam masyarakat, tidak terkecuali di bidang hukum waris adat.

Penulis mengkaji dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal terhadap pewarisan kepada anak perempuan. Perkembangan hukum semakin mengarah ke tujuan dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal terkait pewarisan

⁶ Ni Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus*, (Denpasar : Udayana University Press), hlm.93.

⁷ I Komang Kawi Arta, dkk., Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunitas Justitia Vol.1 No.1 Tahun 2018, hlm. 34.

kepada anak perempuan; 2) Bagaimana arah perkembangan hukum waris adat terhadap pewarisan kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan sehingga penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan.

Bahan dalam penelitian kepustakaan meliputi berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman 2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, No. 01 / KEP / PSM- 3 / MDP Bali / X / 2010.

f. Yurisprudensi No. 3/Yur/Pdt/2018, sumber Putusan MA RI No. 179 K/Sip/1961. Putusan yang mengikuti:

1. Putusan MA RI No. 415 K/Sip/1970
2. Putusan MA RI No. 573 K/Pdt/2017
3. Putusan MA RI No. 147 K/Pdt/2017

4. Putusan MA RI No. 1048 K/Pdt/2012

5. Putusan MA RI No. 1130 K/Pdt/2017

6. Putusan MA RI No. 4766K/Pdt/1998

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku yang membahas tentang hukum keluarga, hukum adat, hukum waris, hukum waris adat.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

B. Cara penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara teknik dokumentasi dan menggunakan alat studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait serta dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

C. Metode penelitian

Hasil penelitian dari data studi kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Terkait Pewarisan Kepada Anak Perempuan

Hukum waris di Indonesia bersifat plural dan sulit untuk dilakukan unifikasi hukum. Hukum waris di Indonesia terdiri dari hukum waris barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris ditundukkan terhadap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang menundukkan diri terhadap hukum waris terikat pada identitas asal usul, agama atau kepercayaan, suku serta pilihan hukum. Hukum waris adat dapat berlaku dan dilaksanakan bagi siapa saja yang menganut selama hukum waris adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban di masyarakat.

Hukum adat dalam kewarisan tidak dapat begitu saja disamaratakan di seluruh nusantara. Khususnya dalam hal sistem kewarisan yang berlaku sekarang masih mendasarkan kepada sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat. Sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia adalah sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Di samping sistem kekerabatan, pewarisan adat juga mendasarkan pada sistem kewarisan yang berbeda-beda di masing-masing masyarakat adat. Adapun sistem kewarisan meliputi sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Sistem kewarisan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yaitu menuju suatu sistem kewarisan nasional.⁸

Menurut Ter Haar sebagai ahli hukum adat menyatakan istilah kekerabatan disebut sebagai “hukum sanak saudara” (*verwantschaps recht*) dan Soerojo Wignjodipoero menyebut dengan “hukum kekeluargaan”, sedangkan

Hilman Hadikusuma menyatakan dengan istilah “hukum adat kekerabatan”.⁹ Pada masyarakat dalam sistem kekerabatan patrilineal, anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi meneruskan dan memperkuat keturunan kerabat suaminya. Pada masyarakat patrilineal Batak, apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki lebih-lebih tidak mempunyai keturunan sama sekali maka dikatakan “putus keturunan”.¹⁰

Dalam susunan masyarakat patrilineal yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima warisan karena dengan berlangsungnya perkawinan maka dianggap anak perempuan sudah keluar dari kerabatnya. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya.¹¹ Sistem kekerabatan patrilineal mengenal perkawinan dengan pembayaran “jujur” yang memindahkan tanggung jawab atas perempuan yang dipinang dari kerabat perempuan ke kerabat laki-laki yang meminang. Sistem kekerabatan patrilineal ditemukan di antaranya di Batak, Bali, Timor, Gayo, Tapanuli.

Jika dilihat dari sisi keadilan, khususnya kedudukan antara laki-laki dan wanita pada era modernisasi dan emansipasi seperti sekarang maka terdapat aturan hukum adat yang

⁸ I ketut Artadi, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, hlm.126.

⁹ Ellyne Dwi P., *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.12-13.

¹¹ Sigit Sapto N., *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Pustaka Iltizam : Solo), hlm. 28.

dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Latar belakang atau alasan dari perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang wajar dan dapat diterima bagi masyarakat adat di mana sistem kekerabatan patrilineal berlaku, namun cara berpikir demikian sudah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut mendorong perspektif gender sebagai tolok ukur yang memandang sistem kekerabatan patrilineal mendiskriminasi kaum perempuan.

Permasalahan dalam hukum adat yang bersifat khas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikembalikan kepada masyarakat adat masing-masing tersebut demi terciptanya rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Di samping itu, sistem kekerabatan tidak boleh dilepaskan begitu saja dengan tujuan negara yakni menuju pada sistem kewarisan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Perempuan bukan hanya sebagai pemeran figuran. Perempuan dalam ajaran agama Hindu mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci. Berbeda dengan hukum waris adat Bali yang mengikuti awig-awig, yang merupakan hasil konstruksi “sang tuan” (laki-laki) sehingga dikatakan bersifat “*male oriented*” (laki-laki cenderung yang menentukan sikap). Awig-awig dikonstruksi oleh masyarakat adat dalam sangkepan yakni suatu forum yang umumnya dihadiri oleh kaum laki-laki dan hampir tidak pernah melibatkan perempuan sehingga kebutuhan, masalah, pengalaman, dan aspirasi perempuan sulit terakomodasi dan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari perspektif gender. Meskipun telah dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan namun dinilai bahwa diskriminasi masih terjadi.¹²

Kitab Manawa Dharmasastra buku ke Sembilan sloka 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan yakni, “Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masing seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikan akan terkucil.”¹³ Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Sesudah 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/ KEP/ PSM-3/ MDP BALI/ X/ 2010 Tanggal 15 Oktober 2010. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk *harta pusaka* dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali yang berpindah ke agama lain maka tidak berhak atas warisan. Apabila orang tua ikhlas, maka tetap terbuka pemberian atas jiwadana atau bekal sukarela.

Tanggal 15 Oktober 2010 merupakan tonggak sejarah bagi kedudukan perempuan Hindu di Bali dalam bidang

¹² Ni Kadek Setyawati, Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol.1 No.2 Oktober 2017, hlm. 619.

¹³ I Gede Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendiun Hukum Hindu*, (Surabaya : Paramita), hlm. 467.

hukum waris adat. Pasamuhan yang diselenggarakan oleh MUDP Bali menghasilkan terobosan untuk mencairkan kekakuan hukum waris adat Bali, yang telah diwariskan turun menurun sejak berabad-abad mendiskriminasi kaum perempuan.¹⁴

Tidak hanya mengenai Keputusan MUDP Bali, akan tetapi putusan hakim juga berperan mengarahkan dinamika hukum yang memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Beberapa putusan antara lain seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang memuat kaidah hukum di mana Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga tanah Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa hukum adat di Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki dan perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707K/SIP/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang memuat kaidah hukum pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan hak laki-laki dalam hukum waris. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1589 K/SIP/1974 mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli dalam pewarisan.

Berdasarkan putusan ini, anak perempuan merupakan ahli waris. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa masyarakat Sasak adalah masyarakat patrilineal akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman mengarah kepada garis ayah maupun ibu. Putusan Pengadilan Kabanjahe Nomor 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa hukum waris Indonesia mengakui pembagian yang sama di antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 397/Pdt.G/2012/PN.Mdn menyatakan bahwa harta warisan yaitu rumah milik pewaris dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 dalam pertimbangan hukumnya, serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/Pdt/2015/PT MDN.

Jika sengketa pembagian harta waris dilakukan secara hukum waris adat, maka dalam masyarakat adat tertentu contohnya masyarakat adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat, namun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan sistem pewarisan yang mengarah ke individual terhadap masing-masing ahli waris. Dari Putusan Nomor 257 K/Pdt/2019 menunjukkan bahwa hukum waris adat di Bali mengalami pergeseran pada era sekarang ini, di mana seharusnya berlaku sistem kewarisan mayorat namun hakim memutuskan sengketa pembagian waris dengan menggunakan sistem pewarisan individual.¹⁵

¹⁴ Ni Nyoman Sukerti, *Loc. Cit.*

¹⁵ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti M., *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali*

Pembagian warisan yang dilakukan dengan sistem individual memberikan bagian kepada masing-masing ahli waris dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan perebutan harta di kemudian hari. Dengan demikian, putusan-putusan hakim mengarah pada arah keadilan bagi masing-masing ahli waris yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Meskipun eksistensi hukum adat masih ada, namun jika terjadi sengketa maka hakim berperan untuk melakukan penemuan hukum sehingga mampu mengakomodasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

B. Arah Perkembangan Hukum Waris Adat terhadap Pewarisan Kepada Anak Perempuan dalam Sistem Kekerbatan Patrilineal

Hukum adat mengenal sistem kewarisan yaitu kolektif, mayorat, dan individual. Dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan saudara-saudara atau adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat. Sistem kewarisan individual cenderung ditemukan pada masyarakat parental. Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan laki-laki terhadap harta peninggalan. Hak waris yang sama tersebut mengandung pengertian hak untuk diberlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.¹⁶

Pemerintah mengarahkan sistem pewarisan ke sistem pewarisan individual melalui ketetapan-ketetapan MPRS,

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional serta melalui putusan-putusan hakim yang mengarahkan perkembangan hukum waris adat ke arah sistem kewarisan individual. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III dinyatakan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda-janda, artinya seorang anak baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 menghendaki hukum keluarga dan hukum waris ke arah hukum adat parental.¹⁷

Di samping Ketetapan MPRS tersebut di atas, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara istri dan suami dalam masyarakat.¹⁸ Kedudukan perempuan dan laki-laki ditegaskan juga dengan adanya putusan-putusan hakim seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 1 November 1961. Melalui putusan tersebut menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris dari peninggalan waris.

Hasil rumusan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang keputusan mengenai hukum adat dalam yurisprudensi mengingatkan bahwa pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya menuju ke arah persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris diperlukan sebagaimana yang berlaku dalam sistem kewarisan parental.¹⁹

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 maka atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan

Pada Masa Sekarang, Media Iuris Vol. 3 No. 2 Juni 2020, hlm.129.

¹⁶ Rifiqi, Harta Peninggalan dari Pewaris terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Bali, Penegakan Hukum Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm. 80.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.80-81.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.81.

¹⁹ *Ibid.*

perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan agar memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.²⁰ Yurisprudensi ini bersumber dari Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut sistem kekerabatan patrilineal. Mahkamah Agung atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia sehingga di Tanah Karo seorang perempuan juga harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Pertimbangan hukum yang senada dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa hukum adat di Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.

Dinamika hukum waris adat juga dapat ditemukan pada perkara lain menyangkut kewarisan adat yang menganut paham patrilineal yaitu Bali dalam Putusan Nomor 4766K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999. Mahkamah Agung menggariskan kaidah hukum bahwa

Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Putusan Mahkamah Agung terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai Putusan Agung berikutnya yaitu Putusan Nomor 1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung di Laporan Tahunan Tahun 2012. Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan atas dasar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki tidak dapat lagi dipertahankan.

Sikap serupa kembali diputus Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 2017 dalam Putusan Nomor 573K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan Putusan Nomor 1130K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur. Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah

²⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html> diakses pada Senin, 22 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.²¹ Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Penerapan hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat. Sistem kewarisan dalam masyarakat adat mengalami pergeseran karena rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri pun berkembang. Dinamika hukum waris adat dalam sistem patrilineal dipengaruhi juga karena putusan hakim dan keputusan pemuka adat. Putusan sengketa waris adat oleh hakim mempertimbangkan pembagian yang adil di antara ahli waris yang mengarah kepada sistem kewarisan individual.

Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya membentuk perspektif yang baru dalam menilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 dan didukung dengan keputusan-keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri, seperti Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/ KEP/ PSM-3/ MDP BALI/ X/ 2010 Tanggal 15 Oktober 2010 maka tampak jelas arah dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal menuju pada persamaan kedudukan dan hak bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

B. Saran

Sifat yang khas dari masing-masing masyarakat adat sulit untuk membentuk unifikasi dalam hukum adat. Hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk terciptanya hukum yang berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Baik pemuka adat yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat adat, legislatif sebagai pembentuk undang-undang, maupun hakim yang memegang fungsi yudikatif harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan melakukan penemuan hukum dengan menggali rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I ketut, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Kekerabatan*, Fajar Agung Hadikusuma, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N., Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo,
- Artadi, I ketut, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post.
- P., Ellyne Dwi, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Pudja, I Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendiun Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya,.
- Sukerti, Ni Nyoman 2012, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus*, Udayana University Press, Denpasar.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal

²¹ *Ibid.*

Arta, I Komang Kawi, dkk., Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali *Aga* di Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunitas Justitia Vol.1 No.1 Tahun 2018.

Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti M., Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang, Media Iuris Vol. 3 No. 2 Juni 2020.

Rifiqi, Harta Peninggalan dari Pewaris terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Bali, Penegakan Hukum Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm. 80.

Setyawati, Ni Kadek, Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol.1 No.2 Oktober 2017.

4. Putusan MA RI No. 1048 K/Pdt/2012

5. Putusan MA RI No. 1130 K/Pdt/2017

6. Putusan MA RI No. 4766K/Pdt/1998

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html> diakses pada Senin, 22 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman 2010. Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, No. 01 / KEP / PSM- 3 / MDP Bali / X / 2010.

Yurisprudensi No. 3/Yur/Pdt/2018, sumber Putusan MA RI No. 179 K/Sip/1961. Putusan yang mengikuti:

1. Putusan MA RI No. 415 K/Sip/1970
2. Putusan MA RI No. 573 K/Pdt/2017
3. Putusan MA RI No. 147 K/Pdt/2017